



**SENGKETA TANAH MANDIKU: STUDI KASUS
TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS HAK MILIK
TANAH DI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER, 2007–2010**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan pada Jurusan Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sastra

oleh

**SITI MUNAWAROH
070110301083**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

2014



**SENGKETA TANAH MANDIKU: STUDI KASUS
TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS HAK MILIK
TANAH DI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN
JEMBER, 2007–2010**

Skripsi

Oleh +

**Siti Munawaroh
070110301083**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Siti Munawaroh

NIM : 070110301083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007–2010” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Desember 2014

Yang menyatakan,

Siti Munawaroh

NIM 070110301083

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk di ujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Edy Burhan Arifin, SU.
NIP. 195712131984031002

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum.
NIP. 196012151989021001

PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas
Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Drs. Edy Burhan Arifin, SU.
NIP. 195712131984031002

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. Nawiyanto, MA., Ph.D
NIP. 196612211992011001

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum.
NIP. 196012151989021001

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,**

Drs. Hairus Salikin, M. Ed.
NIP. 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan buat:

1. Sembah sujud syukurku kepada Ayahanda Muhamad Soali dan Ibunda Susyati yang tak henti-hentinya memberikan limpahan doa dan cinta kasih yang senantiasa mengiringi setiap langkah demi keberhasilan, serta menyediakan segala kemudahan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah-nya kepada penulis agar mampu membalas kebajikannya.
2. Sahabatku Jannatul Firdausyah dan Rofiqoh, yang selalu memberi keceriaan disaat aku sedih dan lelah.
3. Suamiku Sofyan Arie Wijaya, S.Pd Serta Anakku Alvaro Rayan Pradipta tercinta yang selalu menemaniku di saat suka maupun duka. Terima kasih atas support dan semua yang kau berikan untukku.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
5. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.

MOTTO

Seutas tali bukanlah rami, sebatang pohon bukanlah rimba
“Hanya dalam kebersamaan kita akan mendapatkan kekuatan”
(*John Basedow*)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang konflik dengan judul *Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, 2007–2010*. Semula sengketa tanah ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, dan kemudian meledak setelah Perhutani memasang patok batas yang dipasang di Dusun Mandiku Desa Sidodadi, hal ini diduga masyarakat Mandiku sebagai upaya Perhutani untuk menguasai Mandiku.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan konflik tanah tersebut sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hairus Salikin, M. Ed selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember.
2. Bpk Drs. Nawiyanto, MA.,Ph.D., selaku Ketua Jurusan Sejarah
3. Bpk Drs. Edy Burhan Arifin, SU. selaku Dosen Pembimbing I, dan Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum, selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar memberikan waktu, bimbingan, dukungan, motivasi, dan saran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Sunarlan S.S., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bpk dan Ibu Dosen Fakultas Sastra khususnya Jurusan Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama ini.
7. Terima kasih kepada instansi yang terkait dengan penelitian penulis.
8. Keluarga Besar Sejarah angkatan 2007 yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang khususnya teman diskusi penulis, yaitu: Yeni (B. Raden), Hery, Alifin (Nyak), Elly Yuliasutik serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga dapat membangun mental penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 24 Desember 2014

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HPH	: Hak Penguasa Hutan
Ha	: Hektar
HGU	: Hak Guna Usaha
INIS	: Indonesia Netherlands Cooperation In Islamic Studies
KAPOLDA	: Kepala Polisi Daerah
KAPOLRI	: Kepala Polisi Republik Indonesia
KOMNAS HAM	: Komisi nasional Hak Asasi Manusia
KM ²	: Kilo Meter Persegi
KPH	: Kesatuan Pemangkuan Hutan
KTPKW	: Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu
LMOD	: Landbouw Maatschappij Oud Djember.
M	: Meter
MENHUT	: Menteri Kehutanan
MUSPIDA	: Musyawarah Pimpinan Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORBA	: Orde Baru
RI	: Republik Indonesia
RPH	: Resort Pemangkuan Hutan
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam

SMA	: Sekolah Menengah Atas
SIPPER	: Serikat Petani Perjuangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
UUD	: Undang – Undang Dasar
UUPA	: Undang – Undang Pokok Agraria
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PERDA	: Peraturan Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PEMDA	: Pemerintah Daerah
POLRES	: Polisi Resort
POLDA	: Polisi Daerah
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
P3MU	: Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu
TK	: Taman Kanak – kanak
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

DAFTAR ISTILAH

Agresif	: Suatu perilaku yang bersifat menyerang
Antropologi	: Ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lainnya
Birokrasi	: Suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, banyak ditemui di instansi yang sifatnya administratif
<i>Colling Down</i>	: Langkah untuk menuju suatu pencerahan
<i>De Facto</i>	: Pada kenyataannya secara fakta
Dekade	: Masa 10 tahun/Dasawarsa
Depolarisasi	: Penetralan Keadaan polar
Eksplorasi	: Pengambilan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
Eklusif	: Terpisah dari yang lain
Etnisitas	: Bersifat etnis (bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti kedudukan tertentu karena keturunan, agama, adat dll
Evakuasi	: Pengungsian/pemindahan penduduk dari daerah yang berbahaya ke daerah yang aman
Fase	: Perubahan atau perkembangan
Heterogen	: Terdiri dari berbagai irri yang berbeda sifat atau berlainan jenis (beraneka ragam)
Historis	: Berasal dari bahasa Inggris artinya Sejarah
Homogenitas	: Persamaan macam jenis, sifat, watak dari suatu kelompok
Insiden	: Kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan atau

	kematian
Intensitas	: Keadaan tingkatan
<i>Istiqosah</i>	: Doa bersama yang dipimpin oleh kiai
Kiai	: Sebutan bagi alim ulama (pandai dalam agama Islam)
Komprehensif	: Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik
Kondusif	: Memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung
Konservasi	: Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian
Kontradiksi	: Pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan
Kontribusi	: Sumbangan
Korelasi	: Hubungan timbal balik atau sebab akibat
Legislatif	: Berwewenang membuat undang-undang
Loyalitas	: Kepatuhan atau kesetiaan
Majemuk	: Bagian yang merupakan kesatuan
<i>Money Politics</i>	: Politik uang
Multikulturalisme	: Suatu budaya dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, irri , budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut
Orde Baru	: Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia
Otoritas	: Kekuasaan atau wewenang
Pluralisme	: Keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan irri sosial dan politik)
Provokatif	: Merangsang untuk bertindak/menghasut
Psikologis	: Ilmu yang berkaitan dengan mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku

Ras	: suatu individu yang secara turun termurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu
Rasial	: Berdasarkan prasangka terhadap etnis tertentu
Reevakuasi	: Perencanaan pemulangan kembali
Rekonsiliasi	: Perbuatan memulihkan hubungan antar etnis pada keadaan semula
Relasi	: Hubungan/pertalian
Resolusi	: Keputusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah sporad)
Rezim	: Pemerintahan yang berkuasa
Sporadis	: Keadaan yang tidak menentu
<i>Sweeping</i>	: Kata lain dari razia, yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok masyarakat tertentu
Toleransi	: Suatu sikap atau prilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan
Transformasi	: Perubahan bentuk, sifat, dan sebagainya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
RINGKASAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat	15
1.3.1 Tujuan	15
1.3.2 Manfaat	16
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	16
1.5 Tinjauan Pustaka	18
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teoritis	20

1.7	Metode Penelitian.....	23
1.8	Sistematika Penulisan	25
BAB 2	LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT	
	TEMPUREJO	27
2.1	Kondisi Geografis.....	27
2.2	Kondisi Demografis	32
2.3	Kondisi Sosial Ekonomi.....	30
2.4	Perlawanan Masyarakat Mandiku pada 1948 – 1955	39
2.5	Status Tanah Mandiku Desa Sidodadi dan Pondokrejo	46
2.5.1	Terkait Pembayaran Pajak 1987	46
2.5.2	Greens Project Proses Verbaal Tanggal 10 November	
1926.....		48
BAB 3	TUNTUTAN PETANI PERJUANGAN TERHADAP TANAH	
	YANG DIKLAIM PERUM PERHUTANI	51
3.1	Pembentukan Petani Perjuangan	51
3.2	Aksi Perlawanan Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi	
dan Desa Pondokrejo		58
3.2.1	Demonstasi Warga Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan	
Desa Pondokrejo		58
3.2.2	Tuntutan Petani Mandiku dan Pondokrejo.....	58
3.2.3	Hasil dari Tuntutan.....	68
BAB 4	KESIMPULAN	75
	DAFTAR PUSTAKA	125
	LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Klarifikasi Desa dan Klarifikasi tanah..... 29
2. Tabel 2.2 Penduduk Tempurejo 2004 – 2010 31
3. Tabel 3.1 Daftar Kasus Konflik dan Sengketa Agraria di Jember.....64

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Petok Ordinat yang dipasang Perhutani dilahan Dusun Mandiku .. 54
2. Gambar 3.2 Demonstrasi warga Mandiku dan Warga Pondokrejo Di depan
Gedung DPRD Jember 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Izin Lembaga Penelitian Universitas Jember	132
Lampiran B. Surat Izin Bakesbangpol Linmas Kabupaten Jember	133
Lampiran C. Surat Keterangan dan Cuplikan Wawancara	134
C.1. Surat Keterangan Wawancara Agus Sutrisno	134
C.2 Hasil Wawancara Dengan Agus Sutrisno	135
C.3 Surat Keterangan Wawancara Agus Sutrisno	136
C.4 Hasil Wawancara Dengan Agus Sutrisno	137
C.5 Surat Keterangan Wawancara Saeran	138
C.6 Hasil Wawancara Dengan Saeran	139
C.7 Surat Keterangan Wawancara Saeran	140
C.8. Hasil Wawancara Dengan Saeran	141
C.9. Surat Keterangan Wawancara Atiman	142
C.10. Hasil Wawancara Dengan Atiman	143
C.11 Surat Keterangan Wawancara Pani	144
C.12 Hasil Wawancara Dengan Pani	145
Lampiran D. Gambar Peta Pondokrejo dan Mandiku.....	146
Lampiran E Surat Rekomendasi dari Bupati Jember	147
Lampiran F. Surat Pengukuhan Tanah dari BPN kepada Perhutani	149
Lampiran G.Tokoh – tokoh dalam Petani Perjuangan	150
Lampiran H.Gambar Lokasi Desa Pondokrejo dan Dusun Mandiku	152

Abstrak

Artikel ini membahas tentang konflik tanah di Kecamatan Tempurejo, tepatnya di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Konflik berawal dari pemasangan patok batas oleh Perhutani yang diduga oleh masyarakat Mandiku sebagai upaya Perhutani untuk menguasai kawasan Mandiku. Runtuhnya rezim Orde Baru menjadi sebuah titik tolak bagi kebangkitan gerakan organisasi rakyat di berbagai sektor seperti buruh, petani dan nelayan yang selama ini diam. Adanya keterbukaan dan minimnya tindakan represif pada petani di era reformasi semakin memberi peluang bagi mereka untuk melakukan gerakan yang bersifat sosial politik. Tuntutan petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. diawali dengan masalah pemasangan patok batas yang dilakukan Perhutani dan Pengakuan Perhutani bahwa tanah yang ditempati oleh Warga Mandiku dan Warga Pondokrejo merupakan kawasan Hutan yang dimiliki Perhutani. petani yang memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah Petani Perjuangan, para petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berusaha memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Petani Perjuangan. Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Perjuangan Petani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu Status tanah, Tuntutan Petani Perjuangan dan Aksi Perlawanan dilakukan dalam batasan tahun.

2007 hingga 2010. Kesimpulan yang dapat diperoleh, Tuntutan Petani bukan lagi diakibatkan hubungan eksploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan tidak hanya diam.

Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, Tuntutan petani, Perjuangan Petani.

Abstract

This article discusses land conflicts in Sub Tempurejo, precisely in Hamlet Mandiku Sidodadi Village and Village Pondokrejo. Conflict begins with the installation of the boundaries by Perhutani Mandiku suspected by the public as an attempt Perhutani to Mastering Mandiku region. The collapse of the New Order regime becomes a starting point for the revival movement of people's organizations in various sectors such as workers, farmers and fishermen who had been silent. Openness and lack of repressive action on farmers in the reform era increasingly provide opportunities for them to perform movements that are social and political. Demands of the farmers in the village Mandiku Sidodadi and Rural Pondokrejo become one of the cases that arise in the reform. begins with the installation of the boundaries that problem by

Perhutani and Recognition Perhutani that the land occupied by the Citizens and Residents

Pondokrejo Mandiku is owned Perhutani Forest neighborhood. farmers who have the notion that the land has a meaning as an economic resource farmers. Through Farmers Struggle container, farmers in the village Mandiku Sidodadi and Rural Pondokrejo trying to fight for their land rights recognized by Perum Perhutani. Through a qualitative approach with interviews and documentation as data collection efforts, and take the subject of social and political movements performed by Farmers Struggle. This study describes the socio-political movements performed by Farmers Struggle. With a focus on three main issues, namely land status, demands Farmers Struggle and Resistance Action conducted within the confines of the year. 2007 to 2010. The conclusion that can be obtained, Demands Farmers no longer result exploitative relations but also because of the openness of the system that provides opportunities for farmers to do the movement not only silence.

Keywords: land conflicts, political and social movements, demands of farmers, Farmers Struggle.

RINGKASAN

Ringkasan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: *Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*, Siti Munawaroh, 070110301083; 2014, 155, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember. Pemasangan patok dan rencana tukar guling yang diajukan Perhutani sangat meresahkan masyarakat Mandiku dan Pondokrejo. Pada 12 Januari 2008 masyarakat Mandiku yang tergabung dalam Penguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) mengirimkan surat dengan No. 03/P3MU/1.01/2008 kepada Ketua DPRD Jember Cq Komisi A tentang tanah Mandiku. Surat tersebut berisi penyampaian keterangan bahwa telah terjadi pemasangan patok secara sepihak oleh Perhutani Jember di perbatasan Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Pada 16 Januari 2008 Komisi A DPRD Kabupaten Jember Abdul Ghofur, pada kunjungan kerja ke Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berpidato di hadapan masyarakat menyampaikan bahwa tanah yang ada di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo tidak mungkin dihutankan lagi, karena sudah ditempati penduduk yang cukup padat dan juga sudah terdapat bangunan–bangunan yang permanen, lengkap dengan sarana dan prasarana. Abdul Ghofur selaku Komisi A DPRD mengatakan hal demikian tidak membuat masyarakat menjadi tenang karena pemasangan patok tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga pada 02 Februari 2008 masyarakat Mandiku dan Pondokrejo menggelar aksi protes didepan Kantor Perum Perhutani Jember. Pada 27 Mei 2008 pihak Perhutani dan masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo mengadakan rapat bersama di Balai Dusun Mandiku Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Rapat tersebut membahas tentang usulan administrator Perhutani KPH Jember Taufik Setiyadi untuk melakukan tukar guling. Menurut Taufik Setiyadi tukar guling bukan tanpa alasan. Dalam rapat dengan Komisi A DPRD Jember waktu itu, Taufik memaparkan sejumlah alasan mengapa tukar guling

menjadi salah satu solusi konflik tanah Mandiku tersebut. Menurut Taufik, sesuai aturan yang berlaku, luas lahan hutan di Jawa minimal harus 30% dari total luas pulau Jawa. Kenyataannya luas hutan di Jawa hanya 28%, dan oleh sebab itu setiap pelepasan sejengkal tanah di Jawa harus diganti dengan sejengkal hutan pula. Pada 26 Mei 2010 Petani Perjuangan mengirimkan permohonan rekomendasi tanah Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo kepada Bupati Jember yang diketahui oleh Kepala Desa serta Camat Tempurejo. Pada 16 Juni 2010 surat tersebut mendapat respon dari Bupati Jember dengan No. 590/348/1.11/2010. Rekomendasi dari Bupati yang mengatakan bahwa tanah Di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo yang telah ditempati dan digarap secara turun–temurun agar dapat dikeluarkan dari kawasan hutan (*dienclave*) dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Rekomendasi bupati tersebut membuat wakil masyarakat Mandiku dan Pondokrejo yang terkumpul dalam P3MU (Penguyupan Petani Perjuangan Mbah Ungu) Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan KTPKW (Kelompok Tani Perjuangan Kembang Wungu) Desa Pondokrejo kecewa, karena Bupati tidak langsung menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tersebut menjadi hak milik sedangkan Bupati sendiri mempunyai wewenang untuk menegaskan bahwa tanah tersebut dapat menjadi hak milik masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo. Hal ini diungkapkan oleh Agus Sutrisno.